

BAB II

POLITIK dari SEKSUAL HINGGA TEKSTUAL

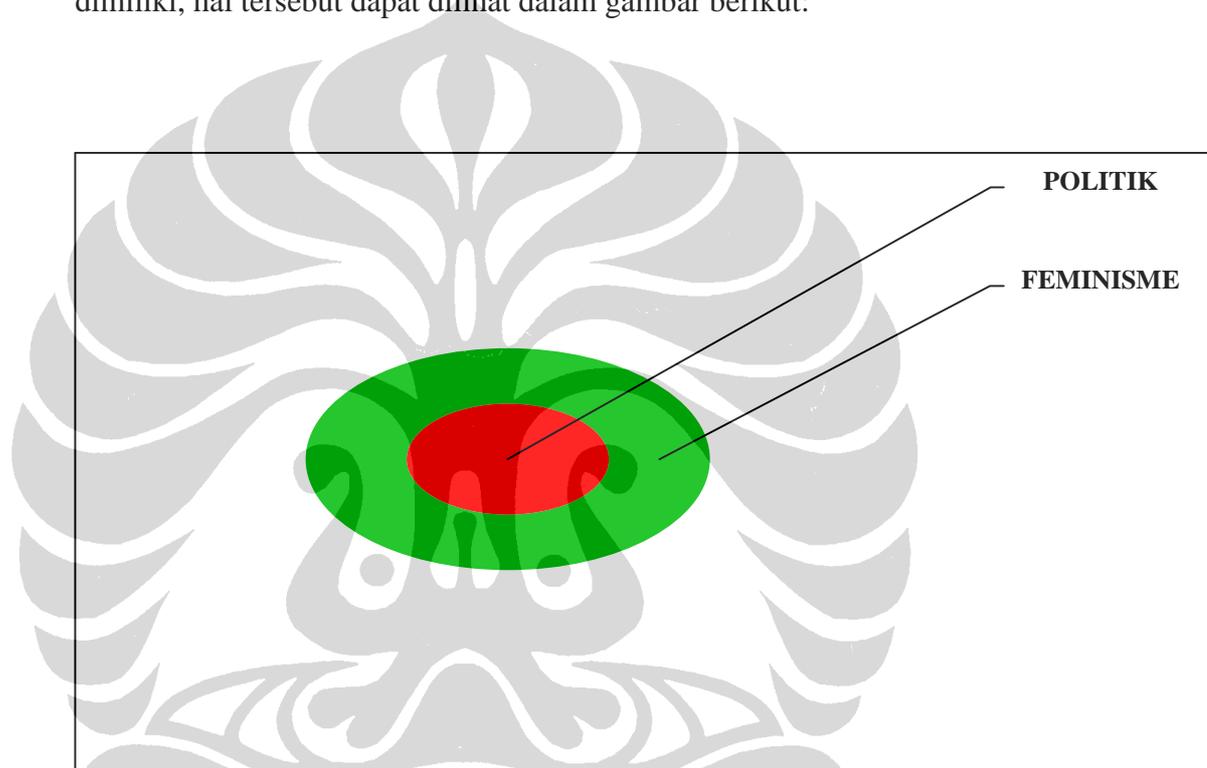
2.1 POLITIK dan FEMINISME

Politik yang telah ada sejak masa Aristoteles memiliki sebuah mekanisme tunggal yakni dibentuk oleh laki-laki dan hanya digunakan oleh laki-laki, lalu dimanakah letak perempuan? Perempuan bagi Aristoteles harus menerima kodrat sejatinya yakni untuk dikuasai. Persoalan kuasa pada awalnya menjadi persoalan yang sangat utama dalam politik, politik identik dengan kuasa dan kuasa dimiliki oleh laki-laki sehingga politik pun identik dengan laki-laki. Politik sebagai sistem yang digunakan oleh negara kendatinya dapat memperlakukan setiap warga negaranya dengan setara baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, politik hanya digunakan sebagai tameng magnet untuk menyalurkan kehendak kuasa laki-laki dalam menarik perempuan untuk mengikuti aturan yang telah laki-laki buat, perempuan hanya menjadi boneka politik laki-laki dan menjadi warga negara kedua. Keadaan tersebut tentu sangat bermasalah dan menggambarkan ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, untuk membongkar persoalan tersebut diperlukan sebuah pendekatan feminisme.

Pada tahun 1700, *Mary Astell* menyatakan bahwa pihak-pihak yang kuat menolak kedaulatan absolut seorang raja, harusnya juga melihat bahwa kekuasaan absolut itu juga ada pada seorang suami. Sembilan puluh tahun kemudian, *Mary Wollstonecraft* yang lebih radikal menuntut bahwa perempuan juga harus punya wakil yang duduk dalam pemerintahan (*representatives*) sebab pada masa itu perempuan tidak diperkenankan ikut langsung dalam pembicaraan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Sejak pemikiran Mary Wollstonecraft itu, para feminis awal akhirnya mulai peduli untuk mengembangkan isu-isu politik.

Feminisme tidak hanya muncul sebagai sebuah gerakan praktis semata namun juga bermain dalam tataran teoritis, dengan kata lain feminisme memiliki sebuah keunggulan karena berada pada tataran praktis dan juga pada tataran teoritis maupun akademis. Selain itu, feminisme memiliki lingkup pengkajian

yang luas karena tidak hanya memperjuangkan hak perempuan namun juga menggali persoalan perempuan secara menyeluruh mulai dari ketubuhan perempuan hingga ruang publik yang mengekang perempuan. Hal tersebut turut menunjukkan bahwa feminisme memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih besar jika dibandingkan dengan politik, politik hanya menjadi bagian kecil dari tubuh feminisme namun sekaligus politik menjadi momok utama feminisme. Feminisme dapat membongkar politik patriarkal dari segala arah karena luasnya ruang yang dimiliki, hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1
Hubungan Feminisme dan Politik

Dalam diagram di atas terlihat jelas lingkaran yang berwarna hijau, yakni feminisme memiliki lingkup yang lebih luas bahkan melingkupi lingkaran merah politik. Politik menjadi bagian dari feminisme serta menjadi kajian utama bahkan feminisme dapat membongkar persoalan politik dari banyak arah. Usaha feminisme untuk mendobrak politik patriarkal terlihat dari pergerakan feminisme awal yang cukup memiliki pengaruh begitu kuat yang terjadi pada tahun 1800an, arah dalam pergerakan ini adalah perjuangan hak-hak politik termasuk di

dalamnya hak untuk memilih, perjuangan ini menampilkan tokoh-tokoh perempuan, seperti Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton.

Meski pada pergerakan awal feminisme terfokus pada persoalan politik namun pada perkembangannya pergerakan feminis turut membongkar persoalan ekonomi, psikoanalisis bahkan bahasa. Kendati arah feminis yang berkembang tersebut tidak menggunakan label politik pada dasar arah gerakan mereka namun tetap saja hakikat dari persoalan mereka pada akhirnya akan bermuara pada persoalan politik. Feminisme tentu berusaha untuk membongkar patriarkal yang sudah sangat melembaga dan usaha ini telah dilakukan sejak feminisme gelombang pertama hingga feminisme gelombang ketiga, yang membedakan antara gelombang tersebut hanyalah arah jalur yang dipilih. Usaha untuk membongkar kekuatan patriarkal tidak lebih dari sebuah usaha pembongkaran politik karena patriarkal merupakan sebuah rantai politik yang sudah sangat mengakar. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh tiga besar gelombang feminisme pada akhirnya bermuara pada satu titik, yakni pembongkaran persoalan politik.

Politik disini bekerja secara terselubung sekaligus secara mengemuka dan itu dilakukan dalam usaha untuk menyalurkan kehendak kuasa laki-laki terhadap perempuan. Hal ini bekerja tidak hanya dalam lingkup besar seperti negara melainkan dimulai dari lingkup kecil keluarga, dalam rumah tangga, laki-laki yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah rumah tangga serta anggota keluarga yang dimilikinya dan hal ini berlanjut pada ranah negara dimana perempuan kembali dijadikan warga negara kedua. Persoalan politik berselubung kekuasaan terhadap perempuan tidak hanya meliputi perepresian perempuan dalam memiliki hak suara politik dan hak ikut serta dalam keterwakilan politik, melainkan ikut masuk dalam ketubuhan perempuan itu sendiri, *the personal is political*. Ketubuhan serta ruang gerak perempuan diliputi dan dililit oleh rantai politik, politik yang berusaha untuk menekan serta menundukkan keotentikan identitas diri perempuan.

Feminisme berusaha untuk menciptakan ruang agar perempuan mendapatkan keotentikan diri mereka secara utuh dan penuh. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya feminisme harus dapat membongkar politik yang telah

dibuat oleh patriarkal dan pembongkaran ini harus dapat menghasilkan sebuah politik yang adil, yang tidak lagi menggunakan jenis kelamin sebagai pembedaan. Seharusnya politik tidak menjadi suatu trauma yang menakutkan bagi perempuan melainkan menjadi sebuah sistem yang dapat merangkul suara perempuan yang telah terpenjara selama ini. Suatu kesalahan besar jika dalam pembongkaran politik patriarkal, perempuan diharuskan untuk bertindak dan berlaku seperti laki-laki dengan harapan agar perempuan dapat setara dengan laki-laki. Saat ini pembicaraan kesetaraan gender menjadi sebuah pernyataan yang sangat tidak relevan, meski demikian hampir menjadi semacam morfin bagi masyarakat untuk menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sekarang setara. Tentu menjadi suatu hal yang janggal jika perempuan harus berperilaku seperti laki-laki.

Dunia ini tidak dapat dimasukkan ke dalam sebuah budaya tunggal, ada dua jenis kelamin di dunia yakni laki-laki dan perempuan sehingga tidak mungkin menciptakan sebuah budaya laki-laki semata. Keadaan saat ini terkadang tampak sebagai simtom netralisasi jenis kelamin, masalahnya apakah keadaan ini memang sebuah pilihan yang berasal dari diri perempuan itu sendiri atau merupakan politik terselubung yang dibangun oleh laki-laki? Disini mereka tidak menjadi perempuan namun mereka menjadi laki-laki, itulah yang diinginkan oleh politik patriarkal karena mereka tidak mau memuat identitas perempuan.

Jika perempuan harus bertindak seperti laki-laki agar dapat setara dengan laki-laki berarti hanya ada satu politik di dunia yakni politik laki-laki, selain itu hal ini juga berimplikasi bahwa hanya ada satu jenis kelamin dan budaya di dunia, yakni jenis kelamin dan budaya laki-laki. Tentunya hal ini yang perlu dibongkar agar politik yang monolog dapat digantikan dengan sebuah sistem politik yang mampu mengaktualisasikan identitas perempuan dan tidak ada lagi pendorongan satu jenis kelamin tertentu. Akan tetapi, pembongkaran terhadap patriarkal tidak memiliki arti bahwa ada suatu usaha yang dilakukan perempuan untuk mendominasi politik agar dapat menjadi milik perempuan atau adanya suatu usaha untuk menghilangkan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki sehingga yang ada hanyalah politik maternal saja. Sungguh tidak rasional jika berusaha untuk menghilangkan perbedaan jenis kelamin karena keinginan untuk menghilangkan perbedaan jenis kelamin sama dengan pembantaian umat manusia

besar-besaran. Memang diperlukan sebuah sistem politik yang tidak hanya mampu merangkul perempuan namun juga menghargai keberadaan kedua jenis kelamin sehingga keadilan gender yang tertunda pun dapat hadir.

Politik dan feminisme tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena inti dari persoalan feminisme selama ini yang tidak lain dari patriarkal adalah persoalan politik. Feminisme memiliki cara tersendiri dalam menguraikan persoalan politik yang telah membungkam diri perempuan, hal ini terlihat dari tiga gelombang besar feminisme yang memiliki cara berbeda dalam usaha untuk membongkar politik.

2.2 POLITIK SEKSUAL HINGGA TEKSTUAL

Sejak awal sudah digambarkan bahwa pokok utama kajian feminisme adalah politik, di dalam politiklah patriarkal bekerja dengan lenggang atas dasar kekuasaan, di dalam politik pula terdapat perepresian posisi perempuan dalam ranah privat keluarga hingga ranah publik negara. Politik adalah permainan kekuasaan, kolaborasi percepatan pikiran laki-laki untuk melancarkan kekuasaan atas nama sistem politik dalam suatu negara, sistem ini bisa berbentuk demokrasi maupun liberal. Diandaikan oleh para laki-laki bahwa perempuan akan aman dan terlindungi dalam sistem politik yang mereka buat namun yang terjadi perempuan tidak lebih dari sebuah boneka politik laki-laki untuk menciptakan satu monolog. Feminisme menguraikan persoalan ini tidak hanya dalam sebuah gerakan untuk meminta hak suara dalam politik semata, melainkan dalam sebuah pembongkaran secara seksual dan tekstual.

2.2.1 Politik Seksual

Persoalan politik seksual tidak dapat luput dari gelombang feminisme radikal, aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal

mempermasalahkan hal seperti tubuh, hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan laki-laki serta dikotomi privat-publik. “*The personal is political*” menjadi slogan utama gelombang radikal yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat. Adanya dikotomi ranah publik dan ranah privat menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan, hal ini dikarenakan ranah privat memiliki tingkatan yang lebih kecil dari pada ranah publik. Tokoh yang sangat terkenal dari gelombang radikal ini adalah Kate Millet, Millet membongkar persoalan politik dalam tubuh perempuan melalui bukunya *Sexual Politics*.

Dalam membongkar persoalan *sexual politics* muncul sebuah pertanyaan dengan nada keraguan, dapatkah hubungan antara jenis kelamin dilihat dari sudut politik? Politik dibawa oleh Millet bukan dalam lingkup partai politik, pertemuan antar relasi maupun sistem aturan, dia mengarahkan term politik ke dalam hubungan struktur kekuasaan, pengaturan yang mana suatu grup dikontrol oleh yang lainnya. Bagi Millet dalam hubungan seksual terjadi sebuah politik kekuasaan yang berjalan dengan sangat lancar.

“Sex is political primarily because the male-female relationship is the paradigm for all power relationship: Social caste supersedes all other forms of inequality: racial, political or economic and unless the clinging to male supremacy as a birthright is finally forgone, all systems of oppression will continue to function simply by virtue of their logical and emotional mandate in the primary human situation.”⁴

Millet melihat bahwa laki-laki memiliki kontrol terhadap ruang publik dan privat yang memiliki konstitusi patriarki oleh karena itu kontrol laki-laki harus dihilangkan jika perempuan ingin mendapatkan kebebasan. Untuk mengeliminasi kontrol laki-laki, laki-laki dan perempuan harus mengeliminasi gender karena telah dikonstruksi dibawah kuasa patriarki. Millet mengatakan bahwa *patrarchal ideology exaggerates biological differences between men and women, making*

⁴ Rosemarie Tong, *Feminist Thought*, hal. 49.

*certain that men always have the dominant and women always have the subordinate.*⁵ Penelusuran sistem hubungan seksual merupakan kasus fenomena yang oleh Max Weber dikatakan sebagai *herrschaft*, hubungan yang terdiri dari dominasi dan subordinasi. Dominasi jenis kelamin terjadi dikarenakan suburnya budaya patriarki, dominasi seksual diperoleh dari ideologi kebudayaan kita dan membuktikan bahwa ini merupakan konsep kekuasaan yang paling fundamental.

Esensi dari politik merupakan kekuasaan dan kekuasaan yang paling fundamental adalah dominasi patriarki laki-laki. Sistem politik patriarki tentunya akan mengontrol perempuan, disini akan muncul dua bentuk kuasa yakni laki-laki mendominasi perempuan dan laki-laki berumur menguasai para orang muda. Politik patriarki berimplikasi besar terhadap perempuan contoh dalam demokrasi dan aristokrasi. Dalam demokrasi bagi Millet, perempuan tidak hanya di kantor maupun dimana saja memiliki nomor yang sangat kecil bahkan di bawah representasi. *Sexual politics* memperoleh persetujuan melalui "sosialisasi" dari kedua jenis kelamin pada dasar politik patriarkal yang lebih condong pada karakter temperamen, peranan dan status.

Pada karakter yang pertama, yakni temperamen meliputi formasi personalitas manusia sepanjang garis stereotip dari kategori seks (maskulin dan feminin) berdasarkan kebutuhan dan nilai dari grup yang dominan dan dituntut oleh apa yang anggota hargai dalam diri mereka dan menemukan kesesuaian dalam subordinat: agresi, intelegensi, kekuatan dan kemandirian dalam diri laki-laki: sementara pada diri perempuan berupa kepasifan, kebodohan, kejinakan, "kebaikan" dan ketidakefektualitas. Hal ini dilengkapi oleh faktor kedua, *sex role*, dimana keputusan konsonan dan elaborasi kode dari tingkah laku, gerak isyarat dan sikap untuk setiap jenis kelamin. Batasan peran yang diberikan pada perempuan cenderung untuk menghentikan mereka pada level pengalaman biologi.

2.2.2 Politik Tekstual

Politik oleh feminisme tidak hanya dibongkar pada persoalan seksual saja tetapi juga pada tataran tekstual. Pembongkaran tekstual ini dilakukan oleh

⁵ *Ibid.*

feminisme gelombang ketiga, wacana feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh pemikiran posmodernisme, dua tokoh feminis yang mewakili gelombang ini sekaligus termasuk dalam lingkup pembongkaran politik tekstual adalah Helene Cixous dan Luce Irigaray, berikut lebih lanjut penjabaran politik tekstual mereka:

a) Helene Cixous

Cixous memiliki kekhasan yang membedakannya dengan feminis lain dalam usaha pembongkaran politik patriarkal yakni melalui gaya penulisan, dia menguraikan gaya menulis perempuan (*l'écriture féminine*) dan gaya menulis laki-laki (*l'écriture masculine*). Menulis digunakan oleh Cixous sebagai sebuah sarana dan senjata baru dalam membongkar politik patriarkal yang sudah sangat melembaga. Dia memusatkan perhatian pada persoalan ruang di mana perempuan ditempatkan oleh kebudayaan, Cixous mempertanyakan kealamiahannya atau ketidakterelakannya hierarki struktural dan dia mengatasi hierarki ini dengan mengembangkan praktek menulis "feminin". Cixous memulai pembongkaran dengan cara menggali mitos yang "melegalkan" sistem patriarkal dan menghancurkan kealamiahannya, salah satu contohnya adalah mitos Oresteia, dia memusatkan perhatian pada perdebatan dalam *Eumenides* mengenai klaim balas dendam pembunuhan suami dan pembunuhan ibu, Cixous menaruh perhatian pada hukum Apollo yang berisi bahwa "perempuan yang kau sebut ibu bukanlah orangtuamu, mereka hanyalah perawat yang memberimu makan...*laki-lakilah sumber kehidupan*".⁶ Hal ini menimbulkan hilangnya rasa bersalah akibat pembunuhan ibu dan berarti melegalkan sistem patriarkal.

Cixous mencetuskan jalan keluar dari politik patriarkal ini yakni melestarikan biseksualitas, bukan sebagai penolakan pada perbedaan seksual tapi sebagai pengakuan yang hidup pada pluralitas, pada kehadiran yang serempak baik maskulinitas maupun feminitas dalam diri subjek individual. Bagi Cixous, tulisan merupakan media istimewa dalam menguraikan biseksualitas non hierarkis. Praktik menulis feminin sendiri baginya tidak dapat didefinisikan, meski demikian Cixous menyebutkan satu ciri praktek menulis ini, yakni kedekatannya

⁶ Madan Sarup, *Poststrukturalisme dan Posmodernisme*, hal. 173.

pada suara. Praktik menulis diproduksi dan dipahami dalam kaitannya dengan tubuh karena kita sering memisahkan pikiran dan tubuh. Praktik menulis merupakan strategi politik yang dilakukan oleh Cixous, kata *feminine* dalam *feminine writing* dimaksudkan oleh Cixous sebagai yang memberdayakan perempuan yang mempunyai minat-minat tertentu baik secara pribadi maupun politik.

b) Luce Irigaray

Luce Irigaray memiliki pendekatan yang hampir sama dengan Cixous yakni melalui bahasa, disamping itu Irigaray juga menggunakan pendekatan psikoanalisis dalam pembahasannya. Irigaray sama seperti Cixous pula ingin mengkritik dan membongkar patriarkal yang sudah sangat melembaga namun dia lebih condong pada pembongkaran patriarkal yang bekerja dalam filsafat, selain itu dia juga memiliki tujuan untuk mendefinisikan identitas perempuan. Dia mengklaim bahwa perempuan membutuhkan bahasa mereka sendiri.

Agar kaum perempuan masuk ke wilayah publik relasi sosial mereka dengan sesamanya dan dengan laki-laki perlu dimutasi secara budaya khususnya secara kebahasaan karena selama ini perempuan miskin akan bahasa feminin, miskin akan kata feminin. Bahasa dan kata yang ada adalah bahasa dan kata maskulin, sehingga mau tidak mau, disadari ataupun tidak disadari, bahasa yang dipakai oleh perempuan sebenarnya merupakan bahasa yang dipinjam dari para patriarkis karena bahasa yang tersedia hanyalah bahasa maskulin dan bukan bahasa feminin. Laki-laki menghaki sandi bahasa melalui tiga gerak: (1) membuktikan bahwa mereka adalah ayah; (2) membuktikan bahwa mereka lebih berdaya dari perempuan-ibu; (3) membuktikan bahwa mereka mampu membuahi-menetapkan cakrawala budaya sebagaimana mereka telah dibuahi oleh cakrawala alami, yakni ovula, rahim, tubuh perempuan.⁷ Laki-laki memberikan dirinya atribut subjek dan merendahkan perempuan ke dalam status objek atau *nothing*. Diperlukan kehadiran subjektif antara ibu dan putri untuk membebaskan diri dan dimulainya penciptaan bahasa yang feminin karena bahasa yang ada merupakan

⁷ Luce Irigaray, *Aku, Kamu, Kita: Belajar Berbeda*, hal. 89.

bahasa maskulin dan hal ini menyulitkan perempuan untuk mengeluarkan wacana dirinya dengan bahasanya sendiri.

Hal lain bagi Irigaray yang penting dilakukan disini adalah pendefinisian identitas perempuan (yang didalamnya mencakup ketubuhan perempuan juga), problem yang muncul disini adalah bagaimana mendefinisikan keotentikan diri perempuan tanpa terjebak kembali dalam kerangka kerja patriarkal maupun bahasa patriarkal yang ingin dihindari? Diperlukan usaha untuk memajukan dan mendorong perkembangan bentuk-bentuk sosial yang spesifik bagi perempuan, *entre-femmes* (sosialitas antara dan antarperempuan) merupakan prasyarat penting bagi penciptaan identitas dan subjektivitas perempuan.⁸ Dekonstruksi yang paling penting disini adalah pencapaiannya dalam melawan dasar-dasar tatanan politik patriarkis.

Kebudayaan patriarkal merupakan budaya yang monoseksual dimana laki-laki berbicara kepada laki-laki. Laki-laki memproyeksikan egonya pada dunia, yang kemudian menjadi cermin yang memungkinnnya melihat bayangannya sendiri dimana-mana. Perlu dibangun kondisi subjektivitas perempuan, dimana perempuan dapat memperoleh "aku" yang berasal dari wacana mereka sendiri dan bukan sebagai turunan dari "saya" laki-laki. Perempuan membutuhkan bahasa mereka sendiri, perempuan membutuhkan rumah bahasa (*house of language*); mereka membutuhkan rumah tinggal yang tidak memenjarakan mereka; tempat tinggal yang memungkinkan mereka tumbuh berkembang adalah prasyarat bagi mereka untuk menjadi, dibutuhkan transformasi kultural yang sangat besar. Perempuan harus berperan sebagai subjek, menempati posisi subjek lebih dari sekedar persoalan posisi pengucapan, tapi juga harus berakar pada praktik sosial. Salah satu aspek definisi perempuan sebagai subjek ini adalah bahwa perempuan harus ikut terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik.

2.3 KOLABORASI POLITIK SEKSUAL dan TEKSTUAL

⁸ Sarup, *op. cit.*, hal. 182.

Baik politik seksual maupun politik tekstual tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, disinilah *analysis comparison* diperlukan untuk menghasilkan sebuah formula baru yang tentunya jauh melampaui gagasan yang terdapat di dalam politik seksual dan politik tekstual. Sebuah teori tentu tidak mungkin berdiri tanpa cela, cela itu dapat menjadi kelemahan namun juga terkadang menjadi kelebihan teori tersebut. Dualisme politik dalam bentuk seksual dan tekstual dapat menjadi sebuah keunggulan jika dapat dikolaborasi secara jeli namun untuk sampai pada titik tersebut terlebih dahulu diperlukan denah pemetaan seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1
Perbandingan Politik Seksual dan Politik Tekstual

NO		KELEBIHAN	KEKURANGAN
1	Politik Seksual Kate Millet	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan ketubuhan perempuan telah dikuasai oleh laki-laki dan menjadi objek utama laki-laki. • Menunjukkan terjadinya politik patriarki dalam ranah privat perempuan. • Menunjukkan bahwa seks tidak lebih dari politik terselubung patriarkal. • Menunjukkan bahwa esensi dari politik yang merupakan kekuasaan terletak pada dominasi seksual yang dikuasai oleh laki-laki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eleminasi gender sama saja dengan menyetarakan laki-laki dan perempuan, padahal keduanya memiliki perbedaan satu sama lain yang harus diterima. • Persoalan politik tidak hanya meliputi persoalan perbedaan seksual semata melainkan juga pendobrakan sistem politik yang telah mengikat.

2	Politik Tekstual Helene Cixous	<ul style="list-style-type: none"> • Membongkar patriarkal melalui sebuah strategi baru, yakni <i>feminin writing</i> dan menggunakan mitos sebagai usaha pembongkaran secara mengakar. • Adanya usaha mengganti perbedaan seksual yang ada dengan melestarikan biseksualitas, pengakuan akan pluralitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Politik sebagai sebuah hal yang bersifat teoritis sekaligus praktis tidak dapat terpecahkan hanya melalui tulisan teoritis semata, pendobrakan yang dilakukan dalam lingkup ini hanya menjadi sebuah angin lalu yang tak banyak berarti dalam suatu perubahan.
3	Politik Tekstual Luce Irigaray	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapkan identitas perempuan melalui <i>entre-femmes</i> (sosialitas antara dan antarperempuan) sebagai prasyarat penting. • Perlunya rumah bahasa (<i>house of language</i>) untuk perempuan, perempuan memerlukan bahasa mereka sendiri untuk mengartikulasikan diri mereka. • Tidak menerimanya kesetaraan antara laki- 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan bahasa perempuan dan bahasa laki-laki sama saja berusaha untuk menyamai kedudukan laki-laki, yang dibutuhkan bukanlah kesetaraan maupun pendominasi gender tertentu melainkan sikap menghargai perbedaan yang ada dan berusaha menciptakan keadilan diantaranya. • Bahasa memang alat artikulasi yang sangat penting dalam menyuarakan identitas oleh

		laki dan perempuan. <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan harus berperan sebagai subjek, bukan hanya berucap sebagai perempuan namun juga harus terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik. 	karena itu diperlukan bahasa yang bersifat biseksualitas. <ul style="list-style-type: none"> •Meski demikian pembongkaran politik patriarki tidak dapat dilakukan jika hanya mengandalkan bahasa semata karena bahasa merupakan media komunikasi dan bukan sistem kekuasaan yang mengekang.
--	--	--	---

Tabel di atas memang hanya menganalisa tiga teori besar feminisme, namun teori tersebut cukup representatif terhadap dualisme politik seksual dan politik tekstual. Tentu saja persoalan politik dalam perempuan memiliki cakupan yang lebih luas daripada seksual dan tekstual, kendati demikian politik pun tidak dapat luput dari dua hal tersebut karena politik turut menyeret ruang privat publik perempuan dan pencapaian identitas perempuan yang hadir tertunda dalam politik, dengan kata lain seksual dan tekstual menjadi bagian persoalan dasar dalam politik. Selain itu, jika dilihat dari akar historisitas gelombang feminisme yang ada dan tentu saja pada persoalan politik perempuan setidaknya terdiri dari tiga tahap, yakni:

- a) Tahap pertama pada gelombang pertama feminisme yakni feminis liberal dan radikal. Feminisme liberal melakukan pembongkaran politik yang dilakukan melalui sebuah pergerakan praktis dalam meminta kesempatan hak sipil. Sedangkan feminis radikal mengaitkan term politik dengan persoalan seksual jenis kelamin dan bergerak pada tahap yang lebih maju dari gelombang liberal

karena tidak hanya bergerak pada tataran praktis semata namun juga sudah masuk ke dalam tataran teoritis seperti yang dilakukan oleh Kate Millet.

- b) Tahap kedua pada gelombang kedua feminisme, pembongkaran persoalan politik pada saat itu terarah pada pernyataan bahwa "perempuan dan laki-laki adalah sama". Politik yang berlaku disini adalah persamaan jenis kelamin, feminisme berusaha melihat perbedaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aktivitas kehidupan dan *psyche* antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan (*difference*) menjadi pusat kajian feminisme gelombang ini.
- c) Tahap ketiga pada gelombang feminisme ketiga, dimana pembongkaran politik patriarkal dilakukan dalam media tulisan dan bahasa (tekstual), disini tidak ada lagi pergerakan praktis melainkan fokus pada teori tekstual.

Dari penjabaran historisitas gelombang feminisme tersebut terlihat bahwa politik memang menjadi momok utama yang harus dibongkar oleh feminis agar dapat menghancurkan sistem patriarkal yang sudah melembaga dengan subur dalam masyarakat. Meski demikian, tetap saja ketiga gelombang feminisme tersebut memiliki kekurangan karena mereka hanya menyentuh politik tidak secara utuh, politik yang dibongkar hanya berkutat pada ketubuhan perempuan, perbedaan jenis kelamin serta bahasa. Ketiga gelombang itu belum berani menyinggung persoalan identitas perempuan sebagai warga negara dalam sebuah negara dan mereka juga belum berani menyentuh ranah publik dalam usahanya untuk menggali sistem politik yang dibutuhkan oleh perempuan dalam sebuah negara termasuk di dalamnya budaya.

Pembongkaran politik patriarkal disini tidak diarahkan untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki ataupun sebagai pergerakan yang hanya membela perempuan, namun sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan keadilan. Tentu saja jika melihat fakta yang ada politik tidaklah memberi ruang bagi perempuan, politik justru mengekang perempuan, apakah keadaan ini dapat dikatakan sebagai sebuah keadilan? Yang didambakan disini adalah sistem politik yang mampu memberikan ruang keadilan bagi laki-laki maupun bagi perempuan,

dimana keadilan ini dapat tercipta jika politik yang selama ini dilandasi oleh patriarkal dapat dibongkar sehingga perempuan tidak lagi inferior dan harus menerima kodratnya untuk dikuasai oleh laki-laki, untuk itu diperlukan sebuah sistem politik baru yang tidak hanya ramah terhadap perempuan tetapi juga ramah gender dan menuju keadilan.

Keadilan bagi perempuan dalam ruang politik selama ini mengalami *differance* (meminjam istilah Derrida), dia hadir dengan tertunda, dia tidak pernah hadir di awal dan menyelesaikan persoalan melainkan hadir dengan tertunda. Keadilan perempuan tertunda di dalam politik, dalam ketidakadilanlah sekaligus muncul keadilan secara tertunda. Sulit untuk mengedepankan keadilan di muka atau di depan karena dia hadir tertunda, ketidakadilanlah yang selalu hadir terbuka dan membuka dan inilah yang terjadi dalam politik terhadap perempuan. Akan tetapi, permasalahan disini diarahkan pada pembongkaran politik dan bukan keadilan, meski pada akhirnya keadilan jenis kelamin dalam politik menjadi tujuan yang diharapkan.

Pembongkaran politik patriarkal tidak hanya dapat dilakukan secara praktis semata namun juga secara teoritis, disinilah tabel perbandingan antara politik seksual dan politik tekstual serta penjabaran historisitas tiga gelombang feminisme diperlukan. Dari perbandingan tersebut dapat dikolaborasi keunggulan masing-masing yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan karakteristik baru untuk menciptakan suatu sistem politik, dengan demikian dalam tubuh sistem politik yang baru nanti akan memiliki karakter kuat seperti:

- Pelestarian biseksualitas (baik dalam bahasa, perilaku, gaya tulisan dan sebagainya).
- Adanya ruang bagi perempuan untuk berperan sebagai subjek bagi diri mereka sendiri dan terdapat kemudahan akses bagi perempuan untuk keluar masuk ruang privat publik tanpa ada batasan.
- Tidak mengobjekan perempuan dan tidak menjadikan seksual sebagai modal untuk mendapatkan kekuasaan.

Meski demikian, karakter politik di atas tidak bermaksud untuk mendominasi laki-laki, melainkan untuk menciptakan persamaan politik baik

untuk laki-laki maupun perempuan. Usaha menciptakan suatu sistem politik yang adil dapat ditempuh melalui sistem politik yang bersifat biseksual, secara mentah politik biseksual dapat diartikan sebagai politik yang berjenis kelamin dua, yakni laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, politik biseksual disini tidak terkait dengan persoalan gender karena jika kembali pada persoalan gender maka sama saja dengan mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu. Politik biseksual yang dimaksud merupakan sebuah politik yang melampaui term gender itu sendiri, term gender terbatas pada suatu identitas kelamin semata namun politik biseksual melampaui identitas gender yang melekat pada seseorang. Politik biseksual bergerak *beyond of gender*, yang menjadi fokus bukan lagi perbedaan gender namun identitas apa yang mampu diartikulasikan dibalik dari gender itu sendiri.

Politik yang berjenis kelamin dua tentunya suatu tawaran yang lebih terdengar adil bagi perempuan jika dibandingkan dengan term politik semata yang nyatanya hanya dikuasai oleh satu pihak saja, yakni laki-laki. Politik biseksual akan membawa sikap keadilan dalam memandang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dapat mendapatkan apa yang mereka mau tanpa menguasai perempuan, begitu juga perempuan akan mendapatkan perlakuan yang adil dan terlepas dari represi kekuasaan. Politik biseksualitas bekerja serupa cermin yang dapat saling memantulkan bayangan masing-masing antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak dimaksudkan dengan perempuan yang bercermin maka akan merasa bahwa dirinya adalah laki-laki begitu juga sebaliknya, namun pantulan cermin disini dimaksudkan bahwa laki-laki yang bercermin akan melihat bahwa vokal kedirian perempuan juga ada dalam cermin diri laki-laki itu, bahwa perempuan juga berdampingan dengan pantulan diri laki-laki itu.

Bayangan perempuan dalam cermin diri laki-laki akan menunjukkan bahwa perempuan sama halnya seperti laki-laki, perempuan berhak atas apa yang laki-laki miliki dan perempuan juga menginginkan apa yang laki-laki inginkan. Jika laki-laki memiliki hak kuasa dalam politik maka perempuan juga menginginkan hal tersebut, jika laki-laki memiliki ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya maka perempuan juga ingin memilikinya, melalui pantulan cermin diharapkan laki-laki dapat mengerti bahwa dalam diri laki-laki ada perempuan dan dalam diri perempuan ada laki-laki sehingga sudah

seharusnya untuk memperlakukan perempuan dengan adil sebagaimana laki-laki memperlakukan diri mereka dan sudah seharusnya ada keadilan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tentu ingin terlepas dari perepresian politik patriarkal dan perempuan ingin menjadi individu yang merdeka penuh, mengutip Hanrry Patrick ” *Give me freedom or death*” dan slogan ini yang digunakan oleh salah seorang feminis Amerika, Alice Paul yang berjuang untuk mendapatkan hak suara politik perempuan pertama di Amerika, kemerdekaan politik perempuan tidak ada apa-apanya jika tidak dibuktikan dalam tindakan nyata.

Cara kerja politik biseksual yang berupa cermin yang memantulkan ini tentunya berbeda dengan teori cermin yang diusung oleh positivisme. Positivisme menggunakan teori cermin secara harfiah sebagai pantulan, namun politik biseksual bergerak *beyod of mirror*. Meski demikian, mengambil politik biseksual sebagai penyelesaian merupakan sebuah lompatan yang cukup jauh karena menyisakan beberapa persoalan yang sangat pokok dalam pembongkaran politik budaya patriarkal. Disamping itu, politik biseksual akan mengantarkan pada suatu situasi yang adil baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadaan yang adil ini akan tercipta jika persoalan perempuan dalam politik dapat dipecahkan, persoalan tersebut meliputi: identitas perempuan dalam politik, ketubuhan perempuan serta ruang gerak perempuan dalam ruang privat dan publik, status kewarganegaraan perempuan dalam negara dan sistem politik yang dapat mewujudkan politik biseksualitas itu sendiri.

Persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan hanya dengan pedoman tiga gelombang besar feminisme, namun diperlukan kajian yang memang secara radikal dapat membongkar dan menjawab persoalan tersebut. Telah diketahui bahwa politik tekstual dan seksual kurang ampuh untuk mendekonstruksi politik patriarkal yang telah merepresi perempuan karena disatu sisi mereka hanya menekankan hal praktis sementara pada sisi lain hanya menekankan hal teoritis, diperlukan suatu kajian yang mencakupi kedua hal tersebut dan kajian ini adalah feminis politik.

Dalam feminis politik persoalan antara perempuan dan politik akan didekonstruksi dalam lingkup yang lebih luas dan jelas serta meliputi negara dan sistem pemerintahannya, yang mana semua itu turut menunda perempuan dalam

mengartikulasikan identitasnya. Feminis politik dalam mewujudkan politik yang adil dan ramah gender memerlukan dua hal dalam praktis dan teoritisnya, yakni sistem politik dan cara kerja sistem politik tersebut. Cara kerja sistem politik ini akan mewujudkan sistem politik yang diinginkan sehingga politik yang bercirikan ramah gender dan adil dapat tercapai.

